

Disertasi

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP BARANG BUKTI
UNTUK MEMBERIKAN KEADILAN DAN KEMANFAATAN KEPADA
YANG PALING BERHAQ PADA PROSES PENYIDIKAN**



*Diajukan untuk memenuhi persyaratan
dalam rangka memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum*

Oleh :

**BURAHIM BOER
NIM : 1830112004**

Komisi Promotor:

Prof. Dr. Elwi Danil, S.H.,M.H. (Promotor)

Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H.,M.Hum. (Co Promotor)

Dr. Yoserwan, S.H.,M.H.,LL.M. (Co Promotor)

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2023**

ABSTRAK

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP BARANG BUKTI UNTUK MEMBERIKAN KEADILAN DAN KEMANFAATAN KEPADA YANG PALING BERHAK PADA PROSES PENYIDIKAN (Burahim Boer, 1830112004, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas)

Ubi Societas Ibi Ius, adalah ungkapan Marcus Tullius Cicero bahwa dimana ada masyarakat disana ada hukum, Thomas Hobbes mengungkapkan *homo homini lupus*, tidak ada hukum maka mengakibatkan kondisi *chaos*. Dimana ada hak, maka selalu harus ada kemungkinan memperbaikinya, sesuai asas *Ubi Jus Ibi remidui*, Penulisan ini dikaitkan dengan barang bukti yang disita penyidik, hanya untuk kepentingan pembuktian tidak memperhatikan hak pemilik yang paling berhak. Hal ini tidak sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld*, *geen straf zonder nut*, dimana tiada pidana tanpa kesalahan, tiada kesalahan tanpa kemanfaatan. Penulisan ini membahas tentang kepastian hukum terhadap barang bukti untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan kepada yang paling berhak pada proses penyidikan. Penelitian normatif dengan teori penegakan hukum, kepastian hukum, pembuktian dan keadilan/utilitarianisme tentang kebenaran norma hukum dan penerapannya oleh penegak hukum tentang pengaturan dan proses penanganan barang bukti ditinjau dari aspek keadilan dan kemanfaatan, proses menemukan dan fungsi barang bukti serta kepastian hukum pengembalian barang bukti kepada yang paling berhak pada proses penyidikan. Tidak ada norma hukum untuk kepastian pengembalian barang bukti kepada yang paling berhak seperti penetapan barang bukti narkotika. Barang bukti hanya disimpan penyidik dan tidak dititip rawat kepada pengembalian fungsi pengelolaan barang bukti dilingkungan Polri atau di rubasan karena tidak ada tempat dan dukungan anggaran serta keterbatasan rubasan, sehingga tidak terpenuhi keadilan dan kemanfaatan untuk pemilik barang bukti yang paling berhak. Administrasi penyitaan hanya berupa surat tanda terima dan berita acara penyitaan tanpa dikuatkan alat bukti. Fungsi barang bukti untuk menguatkan alat bukti yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Barang bukti dikembalikan kepada yang paling berhak apabila dihentikan penyidikan dan ada putusan pengadilan. Masyarakat hanya menerima kebijakan penyidik yaitu pinjam pakai dan tidak ada upaya hukum karena tidak ada norma hukum yang mengaturnya. Untuk adanya kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan kepada yang paling berhak, perlu ada norma hukum untuk pengembalian barang bukti pada proses penyidikan seperti adanya penetapan barang bukti narkotika dan upaya hukum untuk penetapan tersebut. Perlu tempat dan anggaran untuk penyidik dan atau pengembalian fungsi pengelolaan barang bukti dilingkungan Polri dan diadakan rubasan setiap kabupaten/kota. Setelah penyitaan agar dilengkapi administrasi penyidikan untuk menguatkan alat bukti. Agar masyarakat memahami norma hukum dan supaya dapat melakukan upaya hukum terhadap penetapan status barang bukti pada proses penyidikan.

Kata Kunci : *Kepastian Hukum, Barang Bukti, Kemanfaatan.*

ABSTRACT

LEGAL CERTAINTY OF EVIDENCE TO PROVIDE JUSTICE AND BENEFIT TO THOSE WHO ARE MOST ENTITLED TO THE INVESTIGATION PROCESS

(Burahim Boer, 1830112004, Doctoral Program in Law, Faculty of Law, Andalas University)

Ubi Societas Ibi Ius, is Marcus Tullius Cicero's expression that where there is society there is law, Thomas Hobbes said homo homini lupus, if there is no law it will result in a condition of chaos. Where there is a right, there must always be the possibility of correcting it, according to the principle of Ubi Jus Ibi remidui. This writing is linked to evidence confiscated by investigators, only for evidentiary purposes without considering the rights of the most entitled owner. This is not in accordance with the principle of geen straf zonder schuld, geen straf zonder nut, where there is no crime without error, no error without benefit. This writing discusses legal certainty regarding evidence to provide justice and benefit to those most entitled to the investigation process. Normative research with theories of law enforcement, legal certainty, evidence and justice/utilitarianism regarding the truth of legal norms and their application by law enforcers regarding the regulation and process of handling evidence in terms of aspects of justice and benefit, the process of finding and functioning of evidence and legal certainty of returning evidence to those most entitled to the investigation process. There are no legal norms for ensuring the return of evidence to those most entitled to it, such as determining narcotics evidence. Evidence is only kept by investigators and is not entrusted to the care of those carrying out evidence management functions within the National Police or in Rupbasan because there is no space and budget support and limited Rupbasan, so that justice and benefits are not met for the most entitled owners of evidence. The confiscation administration only takes the form of a receipt and minutes of confiscation without corroborating evidence. The function of evidence is to strengthen the evidence set forth in the form of an examination report. Evidence is returned to those most entitled to it if the investigation is stopped and a court decision is made. The public only accepts the investigator's policy, namely borrowing and using and there is no legal action because there are no legal norms that regulate it. For legal certainty and justice as well as benefits to those most entitled, there needs to be legal norms for the return of evidence during the investigation process, such as the determination of narcotics evidence and legal remedies for that determination. There is a need for space and budget for investigators and/or those carrying out evidence management functions within the National Police and holding meetings in each district/city. After the confiscation, an administrative investigation must be completed to strengthen the evidence. So that the public understands legal norms and so that they can take legal action to determine the status of evidence during the investigation process.

Keywords: Legal Certainty, Evidence, Benefits.